

**FAKTOR-FAKTOR KEBERHASILAN PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL  
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA***SUCCESS FACTORS OF APPLICATION OF ACCRUAL-BASED ACCOUNTING IN A  
DEVELOPMENT PLANNING AGENCY NORTH SULAWESI AREA*

Oleh:

**Dewi L. Mamontoh<sup>1</sup>****Grace B. Nangoi<sup>2</sup>****Natalia Y.T. Gerungai<sup>3</sup>**<sup>1,2,3</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

<sup>1</sup>dewilmth@gmail.com<sup>2</sup>gracebn@yahoo.com<sup>3</sup>nataliagerungai@gmail.com

**Abstrak:** Organisasi sektor publik di seluruh dunia telah terlibat dalam perubahan kelembagaan, organisasi dan manajerial yang dikenal dengan istilah *New Public Management* (NPM) di Indonesia diawali dengan reformasi bidang keuangan dengan PP 71 tahun 2010 tentang SAP Berbasis Akrua, yang di terapkan selambat-lambatnya 5 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor keberhasilan apa saja yang berperan penting dalam keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual. Jenis penelitian ini adalah studi kasus berdasarkan model Luder 1992, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif pada objek penelitian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dengan narasumber dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini memperoleh hasil dari faktor keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual serta hambatan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Faktor yang paling berperan dalam keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, yaitu Komitmen, SDM yang berkualitas, alat pendukung.

**Kata kunci:** Basis Akrua, Komitmen, Sumber Daya Manusia, Sistem Teknologi Informasi.

**Abstract:** Public sector organizations around the world have been involved in institutional, organization and managerial changes known as *New Public Management* (NPM) in Indonesia starting with reforms in the financial sector with PP 71 of 2010 concerning Accrual -Based SAP, which is implemented no later than 5 years. This study aims to determine what success factors play an important role in the successful application of accrual-based accounting. This type of research is a case study based on the Luder 1992 model, using a qualitative descriptive approach to the research object of the Regional Development Planning Agency of North Sulawesi Province. Data collection techniques using in-depth interviews with resource persons and documentation. Data analysis using data reduction, data presentation, and drawing conclusion. This study obtained the results of the success factors of accrual-based accounting application as well as obstacles in the Application of accrual-based accounting in the Regional Development Planning Agency. The factors that play most role in the successful application of accrual-based accounting in the North Sulawesi Regional Development Planning Agency are commitment, quality human resource, and supporting tools.

**Keywords:** Accrual Based, Commitment, Human Resource, Information Technology System.

**PENDAHULUAN****Latar Belakang**

Penerapan *New Public Management* di Indonesia diawali dengan adanya reformasi di bidang keuangan dengan lahirnya tiga paket Undang-undang, yaitu Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbedaan Negara, dan Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, telah menandai dimulainya Era baru dalam pengelolaan keuangan negara (Akhmad, Solikin 2006 dalam Kristiawati 2015:172). Dari fenomena tersebut maka lahir PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Cash Toward Accrual yang kemudian diikuti dengan lahirnya PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. Dimana ini merupakan suatu keinginan dari berbagai pihak untuk dapat menciptakan suatu pengelolaan keuangan publik yang lebih transparansi dan dapat memperbaiki efisiensi dan efektivitas publik. Sebagai wujud dari suatu bentuk reformasi maka Pemerintah Indonesia telah mencanangkan untuk melakukan perubahan reformasi terutama di bidang akuntansi. Salah satu reformasi yang dilakukan oleh Pemerintah adalah keharusan untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual pada setiap instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah, yang dimulai tahun anggaran 2008. *New Public Management* telah mereformasi pengelolaan keuangan sektor publik dengan menggunakan pendekatan- pendekatan yang ada pada sektor swasta dalam rangka mencapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan sektor publik, maka diperlukan sebuah alat pengukuran kinerja dan pertanggungjawaban. Akuntansi yang berperan sebagai alat pengukuran kinerja dan pertanggungjawaban juga menjalani sebuah perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah penerapan sistem akrual yang merupakan adopsi dari sektor swasta menggantikan sistem kas.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau disingkat menjadi Bappeda, merupakan lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah, dengan salah satu fungsi yaitu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi yang dipimpin oleh kepala badan dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sekertaris Daerah. Dengan adanya PP 71 tahun 2010 dalam mengimplementasi Akuntansi Berbasis Akrua selambat-lambatnya 5 tahun, peneliti tertarik mengkaji faktor-faktor keberhasilan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Utara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti dan gambaran yang lebih nyata mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Utara. Oleh karena itu penelitian ini diberi judul, Faktor-faktor Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Utara.

**Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor keberhasilan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Utara.

**TINJAUAN PUSTAKA****Akuntansi Sektor Publik**

Nordiawan (2006:35) dalam Zarzani (2016:4) menyatakan akuntansi sektor publik adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan dari satu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Menurut Halim dan Kusufi (2013:39) dalam Kresna (2020), Akuntansi Sektor Publik mempunyai beberapa tujuan. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban (*Accountability*). Pertanggungjawaban memiliki arti memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat dalam bentuk dan waktu yang tepat yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan lebih lanjut, tujuan dari pertanggungjawaban ini mengharuskan tiap orang atau badan yang mengelola keuangan negara harus memberikan pertanggungjawaban ataupun perhitungan.
- b. Menejerial. Tujuan menejerial bahwa akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang di perlukan untuk perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah.
- c. Pengawasan. Tujuan dari pengawasan ini adalah bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat serta penilaian pemerintah.

**PP 71 Tahun 2010**

Literatur PP 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa, dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah dan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel, maka perlu penerapan akuntansi berbasis akrual yang merupakan *best practice* di dunia internasional. Berdasarkan PP Republik Indonesia No. 71 tahun 2010, langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan SAP Berbasis Akrual sebagai berikut:

- a. SAP Berbasis Akrual dikembangkan dari SAP PP 24/2005 dengan mengacu pada *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS) dan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. SAP Berbasis Akrual adalah SAP PP 24/2005 yang telah dikembangkan sesuai dengan basis akrual.
- c. Laporan Operasional yang dalam SAP PP 24/2005 disebut dengan nama Laporan Kinerja Keuangan dan bersifat opsional dalam SAP Berbasis Akrual menjadi salah satu PSAP untuk pelaporan atas pendapatan dan sumber daya ekonomi yang diperoleh dan beban untuk kegiatan pelayanan pemerintahan.
- d. Kerangka konseptual dalam SAP PP 24/2005 dimodifikasi dan di perbaharui sehingga menjadi kerangka konseptual dari PSAP Berbasis Akrual.

Setelah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, SAP Berbasis Akrual dipublikasikan dan didistribusikan kepada masyarakat. Selanjutnya KSAP melakukan sosialisasi SAP Berbasis Akrual kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

**Proses Basis Kas Menuju Akrual**

Menurut Beechy (2007:1) dalam Ferryono (2017:145) basis kas mengakui atau mencatat transaksi atau kejadian hanya pada saat kas diterima atau pada saat kas dikeluarkan, sedangkan kewajiban tidak disajikan pada laporan keuangan begitu juga dengan piutang dan asset lainnya. Sedangkan menurut Simanjuntak (2005:8) dalam Trihani (2018:2) basis kas menuju akrual adalah basis akuntansi yang dikembangkan di Indonesia sebagai transisi menuju basis akrual penuh, dengan cara menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam LRA dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

**Akuntansi Berbasis Akrual**

Pemerintah Indonesia menerapkan basis akuntansi akrual karena basis ini memiliki manfaat yaitu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah, bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan (Kemenkeu, 2014). Selanjutnya kajian dari *European Commission* tentang *Modernizing The EU Accounts* yang dikutip Kemenkeu, 2014 menjelaskan bahwa manfaat dari akuntansi berbasis akrual adalah pengambilan keputusan yang efektif karena telah mendapatkan informasi yang lebih komprehensif, audit yang efektif karena akuntansi akrual menyediakan catatan yang jelas dan koheren, meningkatkan pengendalian politik (*political control*) melalui pemahaman yang lebih baik atas dampak informasi keuangan terhadap kebijakan, dan meminimalisasi risiko kesalahan dalam pembayaran.

Basis akuntansi akrual, seperti yang telah disimpulkan oleh KSAP (2006:3) dalam Lubis (2017:18), yaitu suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Selanjutnya, dalam makalah yang sama, KSAP menyatakan bahwa dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

**New Public Management (NPM)**

Dalam studi Administrasi Publik, kehadiran *New Public Management* ini dimaksudkan untuk melakukan pembaharuan dalam tata kelola sektor publik dengan memperkenalkan ide atau gagasan yang sudah dipraktikkan dalam kegiatan bisnis sektor swasta (Denhardt & Denhardt, 2003) dalam Winengan (2018:67).

Ketujuh aspek tersebut adalah sebagai berikut (Hood, 1991) dalam Sayidah (2015:42):

1. Manajemen profesional di sektor publik
2. Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja
3. Penekanan yang lebih besar pada output dan *outcome*
4. Pemecahan unit-unit kerja di sektor publik
5. Menciptakan persaingan di sektor publik
6. Pengadopsian manajemen sector bisnis ke sektor publik
7. Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam menggunakan sumber daya.

### **Hubungan New Public Management dengan Akuntansi Berbasis Akruwal**

Bunea dan Cosmina (2008:1) dalam Ritonga (2015:27) menjelaskan bahwa konsep New Public Management yang berfokus pada efisiensi memaksa seluruh pemerintahan yang mengadopsinya untuk bekerja lebih keras dan bertanggung jawab secara akuntabel kepada masyarakat mengenai sumber daya yang digunakan sehingga akuntansi memainkan peranan penting dalam perkembangan New Public Management berkaitan dengan pengukuran kinerja penggunaan sumber daya. Oleh karena itu akuntansi khususnya akuntansi akrual merupakan konsep yang ada akibat munculnya New Public Management. Hal ini diperkuat oleh Watskin dan Edward (2007:34) dalam Ritonga (2015:27) yang menjelaskan bahwa "Akuntansi terlihat dalam domain ini sebagai komponen integral dari apa yang sekarang disebut New Public Management ". Lanjut Coonnely dan Hyndmen menjelaskan "Langkah dari kas ke akrual akuntansi oleh banyak pemerintah dipandang sebagai aspek agenda New Public Management berkelanjutan yang dirancang untuk mencapai lebih seperti bisnis dan sektor publik kinerja yang berfokus."

Uraian diatas tentu sangat jelas konsep akuntansi akrual adalah sebuah konsep turunan dari *New Public Management* karena akuntansi akrual merupakan bentuk sistem manajemen sektor privat yang diadopsi ke sektor publik sebagai alat pengukuran kinerja. Bahkan pentingnya akuntansi akrual terhadap NPM diungkapkan oleh Likierman (2003:3) dalam Ritonga (2015:27) yang menjelaskan bahwa pemerintah yang mengadopsi *New Public Management* maka dalam bidang akuntansi harus juga menjalankan akuntansi akrual. Tanpa akuntansi akrual maka adopsi *New Public Management* (NPM) akan berjalan kurang lancar.

### **Teori Kontigensi**

Teori kontigensi diadopsi dalam sektor publik untuk mengevaluasi keefektifan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Para peneliti terdahulu telah mengemukakan bahwa keefektifan penganggaran partisipatif tergantung pada faktor-faktor kontekstual organisasional dan sifat psikologis karyawan (Chenhall 1989 dalam Nazaruddin, 1998 yang dikutip oleh Assagaf 2017).

Model Kontigensi Luder mengusulkan sebuah model yang menjelaskan transisi dari sistem pemerintahan tradisional ke sebuah sistem pemerintahan yang lebih informatif (Kristiawati 2015:176). Adapun tiga kategori variabel kontekstual dalam model teori kontigensi Luder adalah:

1. Stimuli, yaitu peristiwa yang terjadi pada tahap awal proses inovasi dan menciptakan kebutuhan untuk meningkatkan informasi akuntansi kepada pengguna informasi dan meningkatkan kesiapan penyedia informasi untuk menyediakan informasi tersebut.
2. Variabel struktural, yaitu karakteristik sosial dan administrasi politik dari sebuah sistem yang memengaruhi sikap dasar pengguna dan penyedia informasi terhadap gagasan sebuah sistem akuntansi sektor publik yang lebih informatif.
3. Hambatan dalam implementasi, yaitu kondisi lingkungan yang menghambat proses implementasi sebuah sistem akuntansi yang lebih informatif.

### **Faktor-faktor Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis Akruwal**

Ada beberapa tan tangan dalam implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang diantaranya adalah (Humiang 2015:66-67)

#### **1. Sistem Akuntansi dan *IT Based System***

Adanya kompleksitas implementasi akuntansi berbasis akrual, dapat dipastikan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual di lingkungan pemerintahan memerlukan sistem akuntansi dan *IT based system* yang lebih rumit. Selain itu, perlu juga dibangun sistem pengendalian intern yang memadai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan nomor 1 tahun 2004 pasal 58 ayat 1 yang menyatakan:

*"Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku kepala pemerintah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh."*

#### **2. Komitmen dari Pimpinan**

Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Salah satu penyebab kelemahan penyusunan Laporan Keuangan pada beberapa Kementerian/Lembaga adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan.

### 3. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten

Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan tersebut memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan. Pada saat ini, kebutuhan tersebut sangat terasa dengan semakin kuatnya upaya untuk menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius menyusun perencanaan SDM di bidang akuntansi pemerintahan. Di samping itu, peran dari perguruan tinggi dan organisasi profesi tidak kalah pentingnya untuk memenuhi kebutuhan akan SDM yang kompeten di bidang akuntansi pemerintahan.

### 4. Resistensi Terhadap Perubahan

Sebagai layaknya untuk setiap perubahan, bisa jadi ada pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama dan enggan untuk mengikuti perubahan. Untuk itu, perlu disusun berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual dapat berjalan dengan baik tanpa ada resistensi.

## Penelitian Terdahulu

Purwaningrum (2017) dalam penelitiannya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan standar akuntansi berbasis akrual (study pada pemerintahan daerah kabupaten Boyolali), menyatakan hasil penelitian bahwa Kualitas SDM, komitmen organisasi dan komunikasi tidak berpengaruh signifikan dan Teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Latifa, Pawan dan Khandakar (2019) dalam penelitian yang berjudul *Institutional and decision-usefulness factors in the implementation of accrual accounting reforms in the public sector of Tanzania*, dengan hasil penelitian yaitu Ketidaksadaran para pemangku kepentingan utama telah menyebabkan lemahnya komitmen politik dan peraturan. Penerapan akuntansi akrual semakin diperparah oleh kompetensi teknis dan personel yang tidak memadai. Penerapan akuntansi akrual telah meningkatkan akuntabilitas manajerial yang signifikan faktor-faktor yang digunakan penulis dalam penelitian ini Faktor keberhasilan komitmen, SDM dan *It based system*.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Dimana Metode deskriptif merupakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Fokus dari penelitian ini adalah Faktor-faktor keberhasilan dalam menerapkan SAP berbasis akrual, serta kendala yang menghambat proses penerapan basis akrual pada badan perencanaan pembangunan daerah Sulawesi Utara dalam empat aspek yaitu :

- a. Pengelolaan Teknologi Informasi
- b. Komitmen dan Kebijakan Pemerintah
- c. Kualifikasi SDM
- d. Resistensi Terhadap Perubahan

### Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang berlokasi di Jalan 17 Agustus, Kota Manado Sulawesi Utara. Waktu penelitian untuk pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data dilaksanakan sejak bulan Juli 2019 sampai dengan selesai.

### Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Peneliti menggunakan sumber data primer, dimana sumber data diperoleh langsung dari Kepala Sub. Perencanaan Keuangan, dan juga beberapa staf di bagian perencanaan dan keuangan melalui wawancara untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan penelitian ini, dan juga mengambil dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data secara objektif agar pembahasan lebih mendekati keadaan sebenarnya. Metode pengumpulan data adalah dengan wawancara dan dokumentasi.

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan cara tidak langsung, dengan mengumpulkan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan penelitian, seperti data nominatif staf perencanaan keuangan pada bappeda.

### Metode dan Proses Analisis

Jenis penelitian ini adalah studi kasus yang didasarkan pada model Kontigensi Luder (1992), dimana model Kontigensi Luder ini menyarankan bahwa kemungkinan keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual tergantung pada: (a) Rangsangan untuk reformasi, (b) Struktural variabel yang terdiri dari pengguna dan produsen informasi akuntansi, dan (c) Signifikansi hambatan implementasi. Data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui hasil wawancara dan dokumentasi, untuk selanjutnya menyaring keterangan-keterangan yang masuk secara menyeluruh dengan detail kemudian dideskripsikan dalam bentuk laporan dan diaplikasikan ke denagn model Luder's 1992.

Proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Analisis data model Miles dan Huberman terdapat 4 tahap, yaitu:

1. Pengumpulan Data. Dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, yang dilakukan dengan sejumlah pertanyaan mendasari topik tujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini, mengenai faktor pendukung dalam keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual.
2. Tahap Reduksi Data
  - a. Hasil dari wawancara tersebut, peneliti akan memilah data, dan mengkaji keberhasilan dan penghambat implementasi. Dan diambil kesimpulan yang bersifat sementara.
  - b. Dokumen penting lainnya dan data nominatif Pegawai Negeri Sipil (PNS) dianalisis, seperti melihat latar belakang pendidikan dari pegawai untuk dijadikan bahan pertimbangan apakah latar belakang bisa menjadi hambatan implementasi SAP basis akrual pada Badan Perencanaan Pembangunan Sulawesi Utara.
3. Tahap Penyajian Data. Dari hasil reduksi data, Peneliti mengkaji faktor keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual dan kemudian apa yang menjadi hambatan atau masalah dalam penerapan tersebut.
4. Menarik kesimpulan serta saran sehingga dapat dijadikan masukan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Utara.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil penelitian

Dalam menunjang keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual, maka sudah seharusnya pemerintah melakukan pembenahan mulai dari adanya komitmen, SDM yang berkualitas, hingga pengembangan aplikasi yang harus memadai, agar penerapan berbasis akrual dikatakan berhasil di terapkan. Berdasarkan uraian latar belakang dan metodologi penelitian di bab sebelumnya, peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber, yang merupakan Kepala bagian Perencanaan Keuangan dan juga 2 orang staf di bagian perencanaan pembangunan. Berikut ini disajikan dalam bentuk tabulasi dari hasil wawancara dapat dilihat pada tabel 1. berikut:

**Tabel 4.1 Data Hasil Wawancara**

Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara Narasumber 1	Hasil Narasumber 2	Wawancara Narasumber 3
Aplikasi apa yang dipakai Bappeda dalam membuat laporan keuangan berbasis akrual? Apakah teknologi informasi yang ada sudah menunjang?	Adanya SIMDA sebagai sistem akuntansi yang terkomputerisasi. Aplikasi SIMDA ini sudah di <i>upgrade</i> oleh pemerintah sehingga sudah sangat menunjang dalam implementasi basis akrual ini	Yang dipakai yaitu aplikasi SIMDA, dan aplikasi ini sudah sangat mendukung berbeda dengan sewaktu masih menggunakan basis kas menuju akrual, aplikasi ini sudah lebih <i>update</i>	Aplikasi yang di pakai SIMDA dan aplikasi ini sangat menunjang. Karena aplikasi ini sudah di perbaharui sehingga memudahkan untuk membuat laporan keuangan yang berbasis akrual.
Sejauhmana faktor komitmen pemerintah dan juga organisasi terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual?	Pemda menyusun dan menetapkan rencana/strategi implementasi SAP berbasis akrual, dalam bentuk dokumen rencana aksi ( <i>action plan</i> ) dan mengadakan sosialisasi dan juga BIMTEK	Dengan adanya aplikasi SIMDA sudah menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung perubahan.	Faktor komitmen dari pemerintah dan juga organisasi, seperti mengadakan bimtek dan juga sosialisasi.

Bagaimana dengan SDM? apakah latarbelakang pendidikan mempengaruhi penerapan akuntansi berbasis akrual?	Kualitas SDM khusus untuk bagian perencanaan keuangan, bisa dibilang belum memenuhi kualifikasi sebagai pembuat laporan keuangan, karena latar belakang pendidikannya. latar belakang pendidikan sangat berpengaruh dalam penerapan ini sedangkan SDM yang kami punya tidak ada berlatarbelakang akuntansi.	semua staf di bagian ini mempunyai peran dalam penyusunan laporan keuangan, untuk latar belakang pendidikan staf mungkin sangat berpengaruh dalam implementasi, karena cukup mengalami kesulitan karena kurang paham mengenai akuntansi itu sendiri	Sangat berpengaruh karena para staf sering mengalami kesulitan, karena tidak memahami akuntansi dengan baik, kami hanya bisa menginput data ke simda, dan mengikuti arahan.
Adakah staf yang tidak berpartisipasi aktif dalam implementasi basis akrual dan juga resistensi terhadap perubahan?	Semuanya berperan dalam membuat laporan keuangan. Untuk pertahanan diri terhadap perubahan, tidak ada semuanya bisa menyesuaikan diri perlahan.	Semua staf berperan aktif dalam menyusun laporan keuangan. Resistensi terhadap perubahan tidak ada	Semua staf berperan aktif. Resistensi terhadap perubahan tidak ada
Apa yang menjadi kendala dalam penerapan akuntansi berbasis akrual ini?	Staf bagian ekonomi bukan berlatar belakang pendidikan akuntansi dan Kurangnya pengetahuan mengenai akuntansi yang lebih luas	Kendalanya karena bukan latarbelakang pendidikan akuntansi, jadi mengalami kesulitan	Kesulitan karena tidak terlalu paham dengan akuntansi

Sumber data: Narasumber

### Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi

SIMDA sudah digunakan untuk penyusunan laporan keuangan sejak diterapkannya akuntansi berbasis kas menuju akrual. Dengan adanya implementasi berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual, maka di perlukan pembaharuan (*Upgrade*) pada SIMDA, sesuai dengan ketetapan Pemerintah dari berbasis kas menuju akrual menjadi basis akrual.

### Lingkungan/kondisi dan Komitmen Atasan.

Komitmen dari pemerintah daerah maupun kepala instansi BAPPEDA, sudah diberikan dukungan yang relevan. Hal ini dapat di katakan karena komitmen sangat kuat dan juga dukungan dari pemerintah daerah dalam menyusun rencana strategi untuk keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual. dengan mengadakan bimtek guna untuk meningkatkan mutu laporan keuangan dan memberikan gambaran yang lebih luas mengenai kondisi keuangan organisasi berbasis akrual yang lebih akurat.

### Kemampuan SDM pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Upaya pemerintah untuk keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual ini dengan mengadakan pelatihan/sosialisasi pada SDM diantaranya yaitu, Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual melalui SIMDA keuangan versi 2.7 pada 21 april 2014. Kemudian dalam rangka meningkatkan kualitas SDM untuk menunjang kelancaran tugas terkait pengelolaan keuangan daerah, Pemda menyelenggarakan pelatihan teknis standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada 14 juni 2014. Meski beberapa staf keuangan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Utara telah mengikuti beberapa bimtek dan juga pelatihan dari pemda, SDM menjadi kendala untuk keberhasilan penerapan basis akrual ini, dikarenakan SDM yang mereka miliki bukan berlatarbelakang akuntansi.

### Resistensi Terhadap Perubahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, para staf atau pihak terkait tidak ada yang menunjukkan sikap resistensi. Ini dapat di buktikan karena semua staf bagian perencanaan keuangan berperan dalam membuat laporan keuangan, dan juga berpartisipasi aktif dalam pelatihan. Artinya tidak ada resistensi terhadap perubahan sistem akuntansi berbasis akrual pada badan perencanaan pembangunan daerah.

## Pembahasan

Dalam pembahasan penelitian ini, peneliti akan menguraikan serta mengkaji data hasil wawancara dan juga data dokumentasi. Data tersebut adalah data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Utara.

### a. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi.

Perangkat pendukung sistem akuntansi sudah terlaksana dengan baik secara prosedur dan dengan adanya pengembangan aplikasi sistem informasi akuntansi daerah (SIMDA) yang telah diupayakan Pemda sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah, menjadikan kualitas pelaporan keuangan menjadi lebih cepat dan akurat. Aplikasi ini sangat membantu dalam menyusun laporan keuangan yang lebih baik.

### b. Lingkungan/kondisi dan Komitmen Atasan

Upaya-upaya pemerintah daerah untuk keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual di Sulawesi Utara, seperti menyusun dan menetapkan rencana/strategi implementasi SAP berbasis akrual, dalam bentuk dokumen rencana aksi (*action plan*) yang disetujui dan ditandatangani oleh Bupati dan DPRD sebagai bentuk komitmen bersama, Komitmen dari pemerintah maupun atasan di instansi bisa dibilang sudah baik dalam mendukung penerapan akuntansi basis akrual. Seperti yang diketahui bahwa komitmen dari atasan berperan penting, tanpa adanya komitmen dan dukungan dari atasan, visi dan misi suatu organisasi tidak akan terlaksana dengan baik. Maka komitmen menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual.

### c. SDM pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, seperti yang sudah dibahas, masih kurangnya SDM yang memenuhi kualifikasi sebagai penyusun laporan keuangan khususnya di bidang perencanaan keuangan. Dikarenakan SDM rerata tidak berlatarbelakang pendidikan akuntansi. Berdasarkan bahan referensi atau peneliti terdahulu yang telah ditelaah, bahwa SDM juga salah satu hal terpenting untuk penerapan akuntansi berbasis akrual. Dimana jika SDM yang kurang mempunyai pengetahuan mengenai akuntansi secara menyeluruh akan kesulitan beradaptasi dalam perubahan sektor publik.

### d. Resistensi terhadap perubahan

Pada badan perencanaan pembangunan daerah dibagian perencanaan keuangan, tidak ada yang menunjukkan sikap resistensi terhadap penerapan sistem yang baru, semua memiliki peran dalam menyusun laporan keuangan, dan berpartisipasi aktif dalam implementasi tersebut.

Peneliti akan mendeskripsikan temuan bukti dan membentuk suatu hipotesis kerja dan temuan bukti tersebut di aplikasikan ke dalam model Luder (1992). Dapat dilihat pada tabulasi 4.3 :

**Tabel 2. Aplikasi dari model Luder (1992)**

Variabel kontekstual	Hipotesis Kerja	Temuan Bukti
Stimulus (Rangsangan untuk melakukan perubahan dalam hal ini adalah penerapan Akuntansi Berbasis Akrual)	Krisis Ekonomi	Krisis Ekonomi (era Soeharto)
Produsen Informasi Akuntansi Sektor Publik	- Rekrutmen staf dengan kualifikasi yang memadai	- Staf tidak memenuhi kualifikasi
Kendala penerapan sistem akuntansi berbasis akrual	- Sumber daya manusia yang memadai	-Kurangnya pengetahuan staf mengenai Akuntansi

*Sumber data: Hasil olahan sendiri.*

Berikut adalah masing-masing penjelasan setiap variabel.

#### 1. Stimulus (Rangsangan)

Seperti yang diketahui bahwa stimulus adalah hal-hal yang merangsang yang terjadi akibat perubahan lingkungan internal atau eksternal. Krisis Ekonomi era Soeharto (1998) menjadi pemicu reformasi akuntansi sektor publik di Indonesia dan tidak dapat dipisahkan dari reformasi yang lebih luas lagi yang terjadi di perekonomian Indonesia dan sistem politik. Dengan demikian tidak hanya krisis ekonomi saja tetapi pro-demokrasi dan tekanan dari donor Internasional yang akan merangsang upaya Pemerintah Indonesia sehingga Pemerintah akan terus melakukan reformasi terlebih khusus di akuntansi sektor publik.

#### 2. Produsen Informan Akuntansi Sektor Publik

Rekrutmen staf. Rekrutmen merupakan proses yang paling berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi, dalam hal ini untuk keberhasilan menerapkan akuntansi berbasis akrual. Jika badan perencanaan pembangunan



daerah mendapatkan SDM yang memenuhi kualifikasi sebagai penyusun laporan keuangan atau bendahara instansi, akan lebih mempermudah badan perencanaan pembangunan daerah untuk keberhasilan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual maupun perubahan-perubahan sektor publik lainnya yang akan terjadi dimasa depan. Dikarenakan staf dengan kesiapan dasar-dasar akuntansi atau memenuhi kualifikasi akan lebih mudah dan siap untuk menerima perubahan dan juga akan lebih kompeten dalam melakukan pengembangan terhadap perubahan tentang sistem akuntansi, lebih khusus akuntansi berbasis akrual. Ini dapat dilihat dari temuan bukti hasil wawancara, bahwa tidak ada staf bagian pelaporan keuangan yang berlatarbelakang pendidikan akuntansi.

### 3. Kendala Implementasi

Kualifikasi SDM akan menjadi hal yang paling penting dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual, karena laporan keuangan pemerintah sangat tergantung oleh para pembuat laporan keuangan tersebut. Jika staf tidak memiliki dasar-dasar atau pengetahuan akuntansi yang memadai, instansi akan sangat kesulitan dalam menerapkan perubahan-perubahan dari sektor publik, dimana krisis ekonomi era Soeharto (1998) yang menjadi pemicu reformasi akuntansi sektor publik di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari reformasi yang lebih luas lagi, maka badan perencanaan pembangunan daerah Sulawesi utara bagian keuangan, memerlukan SDM yang berlatarbelakang pendidikan akuntansi sehingga memenuhi kualifikasi sebagai penyusun laporan keuangan.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Faktor - faktor keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual pada BAPPEDA di antaranya adalah :

#### 1. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Akuntansi dan Informasi Teknologi *Bassed System* adalah perangkat pendukung yang menjadi salah satu faktor penting dalam penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Utara. Pengembangan aplikasi sistem informasi akuntansi daerah (SIMDA), sudah terlaksana dengan baik secara prosedur oleh Bappeda.

#### 2. Lingkungan/Kondisi dan Komitmen Atasan

Dalam menerapkan sistem Akuntansi Berbasis Akrual, Pemda menyusun dan menetapkan rencana/strategi implementasi SAP Berbasis Akrual, dalam bentuk dokumen rencana aksi (*action plan*), yang disetujui oleh Bupati dan DPRD sebagai bentuk komitmen bersama. Selain itu, komitmen dan dukungan dari atasan Bappeda juga sangat baik, dilihat dari upaya atasan dalam mengadakan pelatihan atau bimtek untuk staf akuntansi.

#### 3. Resistensi Terhadap Perubahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa staf di Bappeda bagian perencanaan keuangan, tidak ditemukan staf yang enggan melakukan perubahan dan tidak ada reaksi emosi negatif atau resistensi terhadap perubahan. Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual, tidak akan berhasil tanpa adanya kerjasama staf untuk mau melakukan suatu perubahan.

### Saran

Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, harus memaksimalkan staf pelaporan keuangan yang ada, dan diadakan lebih banyak *training* mengenai sistem akuntansi berbasis akrual. Disamping itu, rekrutmen staf yang memenuhi kualifikasi juga perlu dilakukan. Berdasarkan temuan bukti dengan menggunakan model Luder 1992, reformasi sistem akuntansi sektor publik akan terus terjadi dan akan selalu bergantung pada SDM. SDM yang memenuhi kualifikasi sebagai akuntan, atau berlatarbelakang pendidikan akuntansi untuk mengelola laporan keuangan akan lebih baik lagi. Dimana, SDM yang memenuhi kualifikasi, dan berkompeten, akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akan menjadi penentu berhasilnya penerapan SAP berbasis akrual. Dan jika nanti di masa depan mengalami perubahan atau pembaharuan dengan akuntansi sektor publik, staf akuntansi akan lebih cepat dan lebih mudah untuk memahami.

## DAFTAR PUSTAKA

Assagaf, M.F. 2017. *Teori Kontinjensi Di Sektor Publik*. <https://mohammadfadlyassagaf.wordpress.com/2017/04/19/teori-kontinjensi-di-sektor-publik/> Diakses pada 17/11/20

- Ferryono, B. 2017. Manfaat Akuntansi Basis AkruaI dan Akuntansi Basis Kas Menuju AkruaI dalam Pengembalian Keputusan Internal Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis (JDAB)*. Vol.4 No.1 p 143-158 <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JDAB/article/view/6797/pdf> Diakses pada 19/11/2020
- Humiang, G.P. 2015. Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Strandar Akuntansi Pemerintah berbasis AkruaI dan Dampaknya Terhadap Sumder Daya Manusia Pada Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*. Vol 6 No.2. p 64-75. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/10496> Diakses pada 17/11/2020
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Nomor 270 Tahun 2014. *Penyesuaian pada Laporan Keuangan Semesteran*. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Sekretaris Badan.
- Kresna. 2020. *Akuntansi Sektor Publik (ASP)*. Konsultan Skripsi. <https://konsultasiskripsi.com/2020/11/13/kinerja-skripsi-dan-tesis-9/> Diakses pada 17/11/2020.
- Kristiawati, E. 2015. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintahan Kalimantan Barat. *Akuntabilitas. Jurnal Ilmu Akuntansi* Vol. VIII, No.3, Desember 2015. hal. 171-190 <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/akuntabilitas/article/view/2771> Diakses pada 05/08/2020
- Latifa, H., Pawan, A, dan K. Shahadat. 2019. Institutional and decision-usefulness factors in the implementation of accrual accounting reforms in the public sector of Tanzania. *Journal Of Accounti ng in Emerging Economics*. ISSN: 2042-1168. p 335-365 <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JAEE-01-2018-0005/full/html> Diakses pada 17/11/2020
- Lubis, F.K. 2017. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Di Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*. Vol. 4, No. 3. p 17-31 <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/JRAM/article/view/329> Diakses pada 17/11/2020
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI 2010*.
- Purwaningrum, I. 2017. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI*. Skripsi. Universitas Muhamadiyah Surakarta. Surakarta.
- Ritonga, M. 2015. *Akuntansi AkruaI dan Penerapannya Di Sektor Publik: Agenda Pembaharuan Di Indonesia*. Skripsi. Program Studi S1 Departemen Akuntansi Universitas Sumatra Utara. Medan.
- Sayidah, N., Mulyaningtyas, A. Dan M Winedar. 2015. Implementasi Konsep New Public Management Di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya. *Jurnal Akuntansi dan Auditing* Vol. 12 No. 1 Tahun 2015 p 39-52. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/akuditi/article/view/13857> Diakses pada 17/11/2020
- Trihani, I. 2018. Analisis Manfaat Basis AkruaI dan Basis Kas Menuju AkruaI Dalam Pengembalian Keputusan Internal Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*. Volume. 6, Nomor 1. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2771> Diakss pada 17/11/2020
- Winengan. 2018. Menakar Penerapan New Public Management dalam Birokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*. Vol. 4, No.1, pp 66- 74. ISSN 2302-2698. <https://jiap.ub.ac.id/index.php/jiap/article/view/727> Diakses pada 19/11/20
- Zarzani. 2016. Analisis Penerapan Sitem Akuntansi Keuangan Daerah Pada SKPD Pemerintahan Acrh (Studi pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh). *Jurnal SI-Men (Akuntansi dan Manajemen) STIES*. Vol.7 No.2 ISSN:2355-0465. <http://jurnal.stiesabang.ac.id/index.php/simen/article/view/61> Diakses pada 19/11/20